PERAN APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KAIDUNDU KECAMATAN BULAWA

JURNAL

ZUMAIR KIAYI
NIM : D02420084

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

PERAN APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KAIDUNDU KECAMATAN BULAWA

Zumair Kiayi[1], Apris Ara Tilome[2], Sri Lestari Hardjo Gintulangi[3]
[123]*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial*
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : zumairkiayi21@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the role of Kaidundu village officials in the process of implementing the village head election using qualitative methods with descriptive research. The results of the research show that the role of the Kaidundu village officials in the election of the Kaidundu village head has a significant impact on the village head election process. The attitudes, social values, and role of village officials in carrying out village head elctions in Kaidundu village show that (1) The majority of village officials show a positive attitude towards the village head election process, by showing commitment and active participation in supporting the process. However, there are variations in individual attitudes that can influence their consistency and effectiveness in carrying out their duties. (2) Social values such as honesty, justice and transparency play an important role in the views and actions of village officials during the village head election process. However, there are also other factors such as loyalty to certain groups or candidates that can influence the interpretation and application of these values. And (3) The behavior of village officials, including interactions with the community and candidates, use of village resources, and decision making, has direct implications for the integrity and success of the village head election process. Having behavior that is consistent with recognized social values can increase community trust in village officials.

Keywords: *Role, Village Officials, Village Head Election*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat desa kaindudu dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat desa kaindudu dalam pemilihan kepala desa kaindudu memiliki dampak signifikan dalam proses pemilihan kepala desa. Sikap, nilai sosial, dan peran aparat desa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa di desa kaindudu menunjukkan bahwa (1) mayoritas aparat desa menunjukkan sikap yang positif terhadap proses pemilihan kepala desa, dengan menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif dalam mendukung proses tersebut. Namun, terdapat variasi dalam sikap individu yang dapat memengaruhi konsistensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas mereka. (2) Nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi memainkan peran penting dalam pandangan dan tindakan aparat desa selama proses pemilihan kepala desa. Namun, terdapat juga faktor-faktor lain seperti loyalitas terhadap kelompok atau kandidat tertentu yang dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan nilai-nilai tersebut. Dan (3) Perilaku aparat desa, termasuk interaksi dengan masyarakat dan kandidat, penggunaan sumber daya desa, dan pengambilan keputusan, memiliki implikasi langsung terhadap integritas dan keberhasilan proses pemilihan kepala desa. Adanya perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai sosial yang diakui dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Kata Kunci: Peran, Aparat Desa, Pilkades

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu proses demokratis yang paling mendasar di tingkat pemerintahan desa. Proses ini memberikan hak kepada warga desa untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa (Febrianti & Sukriono, 2024; Magai et al., 2022). Setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Wahyuni & Fernandes, 2022). Di Desa Kaindudu, yang terletak di Kecamatan Bulawa, proses pemilihan kepala desa memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran aparat desa memiliki relevansi yang besar, karena mereka adalah jembatan vital antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

(Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, 233: 2016) Berdasarkan UU Desa, pengaturan pemilihan kepala desa dimulai dari pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Namun, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak termuat dalam UU Desa. Pengaturan mengenai perselisihan hasil pilkades dicantumkan pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa. Pada Pasal tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkades merupakan kewenangan bupati/walikota. Selanjutnya mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pilkades selama 30 (tiga puluh) hari.

Menurut Randy dan Sarpin (2019: 64), pemilihan kepala desa merupakan salah satu ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat desa untuk menentukan sikap dan rasionalitas politiknya dalam pergantian kekuasaan di tingkat desa. Arah demokrasi tingkat desa dapat dilihat dari dua arus pergerakan yaitu: (Debora dkk, 2018: 2) a) Adanya mekanisme dan prosedur yang menghasilkan penetapan keputusan yang bersifat demokratis; b) Adanya budaya lokal atau kultur dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang digagas oleh para pendiri bangsa *(the founding fathers*).

Pentingnya pemilihan kepala desa yang berkualitas dan adil tidak

hanya mempengaruhi tatanan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi pada kestabilan dan perkembangan lebih luas di tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kaindudu Kecamatan Bulawa, menjadi hal yang sangat penting untuk dieksplorasi.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Desa Kaidundu, yang berada di Kecamatan Bulawa, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengadakan pemilihan kepala desa secara berkala. Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk aparat desa, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Di Desa Kaidundu, proses ini memiliki implikasi signifikan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran aparat desa sebagai unsur pemerintahan setempat memiliki pengaruh besar dalam kelancaran dan transparansi proses pemilihan Kepala Desa.

Data dilapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kaidundu cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dan menganggap pemilihan kepala desa sebagai salah satu wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Survei awal menunjukkan bahwa aparat desa di Desa Kaidundu telah berperan aktif dalam memfasilitasi proses pemilihan kepala desa. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pengawasan selama hari pemilihan. Meskipun terdapat upaya maksimal dari aparat desa, terdapat tantangan yang dihadapi, seperti koordinasi dengan instansi terkait, pengelolaan data pemilih, dan penanganan potensi konflik atau pelanggaran dalam proses pemilihan. Hasil pemilihan kepala desa yang sah dan diakui secara luas oleh masyarakat dapat menjadi cerminan dari kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memiliki dampak besar terhadap legitimasi kepemimpinan desa yang terpilih.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa. Analisis mendalam terhadap peran aparat desa diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa, serta menawarkan rekomendasi yang konkret untuk peningkatan pelaksanaannya di masa depan. Namun yang terjadi di lapangan ialah adanya kecurangan.

Beberapa riset terdahulu terkait peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sudah ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya seperti yang ditulis oleh Selni (2019) yang berjudul Peran

Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Salibabu Kecamatan Salibabu" Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hayono (2021) "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Keepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa" Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut

hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.

Dari 2 penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana dari segi masalah peneliti mengangkat masalah yakni adanya keberpihakan aparat desa pada salah satu pasangan calon, adanya penggelembungan suara atau manipulasi suara pada pemilihan kepala desa, dan tidak adanya inden aparat desa dalam mengawal proses pemilihan kepala desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Robert Linton (1936), dimana peran adalah tingkah laku setiap individu yang memantaskan sesuatu kedudukan tertentu dengan meliputi beberapa indikator seperti: (a) sikap, (b) nilai sosial dan (c) perilaku. Untuk terciptanya pemilihan kepala desa yang damai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi dan hal lain yang sudah direncanakan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang terfokus pada Peran Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kaindudu Kecamatan Bulawa. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Agus, 2020). Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validasinya, sebuah penelitian menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang menggunakan dan jenis penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan tentang Peran Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kaindudu Kecamatan Bulawa.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari beberapa orang yang menjadi informan dan Key Informan, seperti: sekretaris desa, BPD desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaur pemerintahan desa, kaur pembangunan desa, dan kaur keuangan desa. Mereka memiliki informasi mendalam mengenai peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Kaidundu Kecamatan Bulawa.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Menampilkan Data (*Data Display*) dan Verifikasi data (*Data Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Aparat Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Kaindudu Kecamatan Bulawa. Yang di dukung dengan teori Robert Linton (1936), peran adalah tingkah laku setiap individu yang memantaskan sesuatu kedudukan tertentu dengan meliputi beberapa indikator seperti: (a) (a) sikap, (b) nilai sosial dan (c) perilaku.

Peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan umum

(Pemilu), termasuk pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan umum lainnya, sangatlah penting. Kolerasi antara teori Koentjaraningrat dengan Pilkades terletak pada bagaimana pemahaman tentang struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang dianalisis oleh Koentjaraningrat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal, termasuk dalam konteks proses Pilkades di tingkat desa. Mengacu pada indikator teori Robert Linton (1936) tentang sikap, nilai sosial dan perilaku yakni:

Penyelenggaraan pilkades adalah proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi serta implementasi yang baik agar dapat berjalan dengan lancar dan adil. Penyelenggaraan pilkades harus didasarkan pada prinsip demokratis, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Pilkades diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 31 undang-undang ini, terdapat landasan hukum untuk Pilkades. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa antara lain Warga Negara Indonesia yang jika terpilih harus berdomisili di wilayah desa setempat dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Aparat desa memiliki peran penting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), sebagai penyelenggara dan fasilitator proses demokrasi di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran jalannya Pilkades, mulai dari tahap pendaftaran calon, pengaturan tempat pemungutan suara, hingga pengawasan proses pemungutan suara dan perhitungan suara. Selain itu, aparat desa juga memiliki peran dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara Pilkades, serta menjaga netralitas dan keadilan selama proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, peran aparat desa menjadi kunci dalam memastikan bahwa Pilkades berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis.

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aparat desa Kaindudu berkontribusi aktif dalam mengawal pemilihan kepala desa kaindudu yang di ukur dengan teori Robert Linton (1936), peran adalah tingkah laku setiap individu yang memantaskan sesuatu kedudukan tertentu dengan meliputi beberapa indikator seperti: (a) sikap, (b) nilai sosial dan (c) perilaku.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan yang diperoleh peneliti melalui observasi awal yaitu (1) panitia penyelenggara pemilihan kepala desa kaindudu tidak netral (2) daftar pemilih tetap yang tidak valid (3) penggelembungan atau manipulasi suara pada pemilihan dan (4) gangguan keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Setelah peneliti meneliti lebih dalam, masalah yang terjadi hanya merupakan asumsi oleh tim pemenang calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan sehingga tidak terima dengan hasil pilkades tersebut mereka berasumsi seperti demikian.

Robert Linton (1936)

Teori Peran yang dikembangkan oleh Robert Linton pada tahun 1936 menggambarkan

interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut teori ini, harapanharapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tolak ukur yang dimaksud, peneliti berfokus pada tiga indikator antara lain:

1. Sikap

Sikap adalah kecenderungan psikologis yang menentukan bagaimana individu merespon obyek, situasi, atau orang tertentu dalam lingkungan sosial mereka. Sikap sering kali mencakup evaluasi, perasaan, dan perilaku yang konsisten terhadap objek atau individu tersebut. Para ahli telah memberikan beragam definisi tentang sikap, yang mencerminkan kompleksitas dan multidimensionalitas konsep tersebut.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), sikap adalah kecenderungan umum individu untuk mengevaluasi suatu objek dengan cara yang positif atau negatif. Ini melibatkan kombinasi antara kepercayaan individu tentang objek tersebut dan evaluasi afektif terhadapnya.

Allport (1935) mengartikan sikap sebagai suatu kesiapan yang terorganisir dari individu untuk menanggapi suatu objek atau situasi dengan cara yang konsisten. Menurut Allport, sikap mencakup tiga komponen utama: kognitif (kepercayaan atau pengetahuan tentang objek), afektif (perasaan atau evaluasi emosional terhadap objek), dan perilaku (tindakan yang mungkin muncul sebagai hasil dari sikap tersebut).

Sementara itu, Eagly dan Chaiken (1993) memandang sikap sebagai kombinasi antara evaluasi afektif dan evaluasi kognitif terhadap suatu objek, yang membentuk kecenderungan individu untuk merespons objek tersebut secara konsisten dengan cara tertentu.

Menurut Hovland dan Rosenberg (1960), sikap adalah kumpulan predisposisi yang diarahkan oleh individu terhadap objek atau gagasan tertentu, yang cenderung mempengaruhi perilaku individu terhadap objek tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sikap sebagai fenomena psikologis yang melibatkan evaluasi, perasaan, pengetahuan, dan perilaku individu terhadap objek, situasi, atau individu tertentu. Sikap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, nilai-nilai, norma sosial, dan pengaruh lingkungan. Berdasarkan hasil observasi yang ditemui peneliti tentang sikap aparat desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa bahwa ditemui kecurangan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan tidak menggambarkan demokrasi dimana demokrasi sebagai representasi yang keadilan.

Kemudian hasil wawancara, peneliti menemukan hal berbeda dimana pemerintah desa aparat desa berkontribusi secara positif dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pilkades serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat desa yang tujuannya membantu memperkuat partisipasi demokratis, menjaga

integritas proses Pilkades, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

2. Nilai Sosial

Nilai sosial merujuk pada keyakinan, prinsip, atau norma yang dianggap penting oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu dan dinamika sosial dalam suatu budaya atau komunitas. Para ahli telah memberikan beragam deskripsi tentang nilai sosial, menyoroti kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk tatanan sosial dan interaksi manusia.

Kohlberg (1971) mengemukakan bahwa nilai sosial merupakan fondasi moralitas manusia. Menurut teorinya tentang perkembangan moral, individu menginternalisasi nilai-nilai sosial melalui proses sosialisasi, dan nilai-nilai ini memengaruhi proses pengambilan keputusan moral.

Rokeach (1973) memandang nilai sosial sebagai struktur kognitif yang terdiri dari nilai-nilai instrumen (mengenai cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu) dan nilai-nilai terminal (mengenai tujuan akhir atau keadaan yang diinginkan).

Parsons (1951) menekankan bahwa nilai-nilai sosial berperan dalam membentuk struktur sosial dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai sosial membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Hofstede (1980) memperkenalkan konsep dimensi nilai budaya yang mencakup nilai-nilai seperti individualisme vs. kolektivisme, jarak kekuasaan, ketidakpastian yang dihindari, dan orientasi jangka panjang vs. jangka pendek. Menurutnya, perbedaan dalam nilai-nilai ini dapat memengaruhi perilaku individu dan dinamika sosial antarbudaya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, nilai sosial tidak hanya mencakup apa yang dianggap penting oleh individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu, memandu perilaku, dan mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemui peneliti tentang nilai sosial dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kaindudu yakni terdapat penggelembungan atau manipulasi suara pada pemilihan kepala desa kaindudu yang menggambarkan adanya ketidakadilan dalam pemilihan kepala desa terutama sebagai representasi dan keterwakilan kelompok masyarakat khususnya di desa kaidundu.

Kemudian melalui hasil wawancara peneliti menemui hal berbeda yakni, keadilan dalam pemilihan kepala desa melibatkan pengakuan atas kepentingan dan aspirasi beragam dari seluruh masyarakat desa serta memastikan bahwa proses pemilihan tersebut dilakukan dengan integritas, transparansi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Semua berperan aktif dalam memastikan integritas dan kepemimpinan yang berkualitas dalam pemilihan kepala desa. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak

membantu proses pemilihan berjalan dengan baik.

3. Perilaku

Perilaku adalah segala tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh individu dalam interaksi dengan lingkungan. Para ahli telah memberikan beragam deskripsi tentang perilaku, menyoroti faktor-faktor yang memengaruhinya dan konsekuensi dari perilaku tersebut dalam konteks psikologis, sosial, dan budaya.

Bandura (1977) mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor lingkungan, perilaku itu sendiri, dan faktor internal individu seperti keyakinan dan motivasi. Teori belajar sosialnya menekankan peran penting observasi dan peniruan dalam pembentukan perilaku. Skinner (1953) memandang perilaku sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan. Teorinya tentang penguatan menekankan bahwa perilaku akan diperkuat atau dihukum berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari perilaku tersebut.

Maslow (1943) menyoroti bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan, dengan kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri mempengaruhi perilaku pada tingkat yang lebih tinggi daripada kebutuhan yang lebih rendah seperti kebutuhan fisik atau keamanan.

Ajzen (1991) mengemukakan Teori Tindakan Diri (Theory of Planned Behavior) yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat individu untuk bertindak, yang dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan persepsi terhadap kendali diri.

Sementara itu, Lewin (1936) memperkenalkan konsep lapangan psikologis yang menekankan pentingnya memahami situasi atau konteks di mana perilaku terjadi dalam memahami dan memprediksi perilaku individu. Dalam keseluruhan, deskripsi-deskripsi ini menunjukkan bahwa perilaku adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Perilaku dapat dipahami melalui berbagai teori dan pendekatan yang menyoroti aspek-aspek seperti pembelajaran, motivasi, hierarki kebutuhan, dan konteks sosial.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemui peneliti tentang perilaku aparat desa dalam proses pemilihan kepala desa kaindudu yakni adanya gangguan keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dipicu dari tidak adanya independensi aparat desa dalam mengawal proses pilkades.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memperoleh informasi berbeda yakni, aparat desa menunjukan netralitas dan independensi mereka dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap publik. Semuanya berperan dalam mengawal proses demokrasi di tingkat desa terutama dalam menghadapi insiden atau laporan perilaku kecurangan sehingga pilkades berjalan dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran aparat

desa kaindudu dalam pemilihan kepala desa kaindudu memiliki dampak signifikan dalam proses pemilihan kepala desa. Sikap, nilai sosial, dan peran aparat desa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa di desa kaindudu menunjukkan bahwa (1) mayoritas aparat desa menunjukkan sikap yang positif terhadap proses pemilihan kepala desa, dengan menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif dalam mendukung proses tersebut. Namun, terdapat variasi dalam sikap individu yang dapat memengaruhi konsistensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas mereka. (2) Nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi memainkan peran penting dalam pandangan dan tindakan aparat desa selama proses pemilihan kepala desa. Namun, terdapat juga faktor-faktor lain seperti loyalitas terhadap kelompok atau kandidat tertentu yang dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan nilai-nilai tersebut. Dan (3) Perilaku aparat desa, termasuk interaksi dengan masyarakat dan kandidat, penggunaan sumber daya desa, dan pengambilan keputusan, memiliki implikasi langsung terhadap integritas dan keberhasilan proses pemilihan kepala desa. Adanya perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai sosial yang diakui dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan peran aparat desa dalam pemilihan kepala desa yakni (1) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat desa tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai sosial yang relevan dalam proses pemilihan kepala desa. (2) Membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa perilaku aparat desa selaras dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. (3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, termasuk melalui dialog terbuka, debat publik, dan forum diskusi yang melibatkan aparat desa dan calon kepala desa. Dan (4) Memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan akses yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan peran aparat desa dalam pemilihan kepala desa dapat ditingkatkan, sehingga proses tersebut menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, S. (2020). Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau dari Gaya Kognitif dengan Model Problem Based Learning. *Ilmu Pendidikan*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33659/cip.v8i1.145

Agusliansyah. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Illmu Pemerintahan*, *4*(4), 1785–1796.

Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*,*5*(1), 101. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345

Nilamsari, P. N. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu, *2*(January), 6. Retrieved from http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand

Saputra, W. (2016). Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan KemilingBandarLampung.Retrievedfromhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23358%0A

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, *1*(2). https://doi.org/10.7454/jp